BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1. Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat

Semenjak penjajahan Belanda Propinsi Jawa Barat telah berdiri dengan nama Java Province yang pusat pemerintahannya di Batavia setelah berdirinya negara Republik Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, propinsi Jawa Barat merupakan Pemerintahan Daerah Tk. I yang pertama kali dibentuk di Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Gubernur pertama Mas Soetardja Hadi Koesoema.

Karena pada waktu itu merupakan masa revolusi kemerdekaan yang mana negara Republik Indonesia ini harus mempertahankan kemerdekaannya, sehingga mengakibatkan tatalaksana administrasi pemerintahan sangat tidak menentu, ini akibat terjadinya Agresi Militer Belanda pada tahun 1947 dan tahun 1948. Baru setelah pemerintahan Belanda mengakui Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di tahun 1949 yang ditentukan dari hasil sidang Konferensi Meja Bundar di Denhaag Belanda, setelah itu perkembangan tatalaksana administrasi pemerintahan pusat maupun daerah mulai di upayakan untuk memulai roda pemerintah yang baik.

2.2. Struktur Organisasi Biro Keuangan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat

Menurut T. Heru Kasida Brataatmaja yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia yang terbit pada tanggal 1 April 1991 pada halaman 284. Struktur adalah bangun, susun, wujud. Jadi struktur adalah susunan dan tatanan suatu organisasi yang bergerak untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Sedangkan organisasi menurut The Liang Gie dari bukunya Administrasi Perkantoran Modern yang terbit pada tanggal 2 Juli 1984 pada halaman 56 adalah suatu sistem yang berupa organisasi yang terdiri dari 3 unsur yang saling berhubungan, yaitu :

1. Sekelompok orang
2. Kerjasama
3. Dan tujuan tertentu.

Dari perpaduan ketiga unsur itu lahirlah suatu kebulatan yang disebut organisasi.

Struktur organisasi di Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat khususnya di Biro Keuangan berbentuk Fungsional. Organisasi merupakan suatu kerangka kerja yang mencakup adanya suatu pembagian tugas/kegiatan dan wewenang kedalam bagian-bagian dilingkungan instansi pemerintah atau swasta, sehingga dapat terjalin suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Biro Keuangan yang terdapat di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung, merupakan bagian dari organisasi Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat yang berada di bawah Wilayah IV Bidang Administrasi dan Umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat yang berada di No. 23 Tahun 1995 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat disebutkan bahwa struktur organisasi, tugas dan fungsi Biro Keuangan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat telah mempunyai tugas masing-masing.

Biro Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta melaksanakan dan membina administrasi keuangan.

Untuk keuangan mempunyai fungsi antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengendalikan kegiatan. Biro keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi 6 (enam) yaitu :

1. Bagian Anggaran
2. Bagian Pembendaharaan
3. Bagian Pembukuan
4. Bagian Pembukuan

5. Bagian Belanja Pegawai
6. Bagian Bina Anggaran Daerah dan Bawahan

Masing-masing bagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro Keuangan.


INDONESIAN-GERMANY INSTITUTE
I G I